

**KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA ERA PRESIDEN JOKO
WIDODO DI LAUT NATUNA UTARA TAHUN 2014-2019**

(Skripsi)

Oleh

**ZULEIKA ZIHNY MADTARA
NPM 2056071022**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO DI LAUT NATUNA UTARA TAHUN 2014-2019

Oleh

ZULEIKA ZIHNY MADTARA

Laut Natuna Utara merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Laut Natuna Utara termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Namun, Tiongkok mengklaim wilayah perairan tersebut dengan mengeluarkan peta *Nine Dash Line* atau sembilan garis putus-putus. Klaim Tiongkok terhadap *Nine Dash Line* mencakup perairan yang juga dimiliki oleh negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Klaim ini memicu konflik antarnegara karena adanya kepentingan di kawasan tersebut, termasuk kepentingan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia pada Era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, didukung oleh data sekunder yang diambil dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sumber daring seperti Kompas, CNN, BBC, dan sumber relevan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara berhubungan dengan visi Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kepentingan nasional Indonesia di kawasan tersebut mencakup kepentingan pertahanan, ekonomi, tata internasional, dan ideologi. Dalam hal kepentingan pertahanan, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk melindungi kedaulatan wilayah sembari menghindari peningkatan konflik militer di kawasan. Pada kepentingan ekonomi Indonesia mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kemampuan ekspor-impor di wilayah tersebut. Pada kepentingan tata internasional Indonesia berupaya melalui diplomasi dan politik militer dalam mempromosikan perdamaian. Pada kepentingan ideologi Indonesia menjaga identitas sebagai negara kepulauan.

Kata Kunci : Kepentingan Nasional Indonesia, Klaim Tiongkok, Laut Natuna Utara, *Nine Dash Line*, Presiden Joko Widodo.

ABSTRACT

INDONESIA NATIONAL INTERESTS IN THE ERA OF PRESIDENT JOKO WIDODO IN THE NORTH NATUNA SEA IN 2014-2019

By

ZULEIKA ZIHNY MADTARA

The North Natuna Sea is part of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). According to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, the North Natuna Sea falls within Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). However, China has claimed this maritime area by issuing the Nine Dash Line map. China's claim over the Nine Dash Line includes waters that also belong to neighboring countries around the South China Sea. This claim has triggered conflicts among nations due to the competing interests in the region, including Indonesia's interests. This research aims to describe how Indonesia's national interests during the presidency of Joko Widodo in the North Natuna Sea. The theory used in this study was the national interest theory proposed by Donald E. Nuechterlein. This research used a descriptive qualitative method, supported by secondary data obtained from the official websites of the Ministry of Foreign Affairs, the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, this research also used online sources such as Kompas, CNN, BBC, and other relevant sources. The research found research result that Indonesia's national interests in the North Natuna Sea are related to President Joko Widodo's vision of the Global Maritime Axis. Furthermore, the study found that Indonesia's national interests in the region encompass defense, economic, international order, and ideological interests. Regarding defense interests, Indonesia has demonstrated its commitment to protecting its territorial sovereignty while avoiding an escalation of military conflicts in the area. In terms of economic interests, Indonesia has supported economic activities and enhanced its import-export capabilities in the region. Regarding international order interests, Indonesia has strived through diplomacy and military policy to promote peace. In terms of ideological interests, Indonesia has maintained its identity as an archipelagic state.

Keywords: Indonesian National Interests, Tiongkok Claims, North Natuna Sea, Nine Dash Line, President Joko Widodo.

**KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA ERA PRESIDEN JOKO
WIDODO DI LAUT NATUNA UTARA TAHUN 2014-2019**

Oleh

ZULEIKA ZIHNY MADTARA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : **KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA
ERA PRESIDEN JOKO WIDODO DI LAUT
NATUNA UTARA TAHUN 2014-2019**

Nama Mahasiswa : **Zuleika Zihny Madtara**

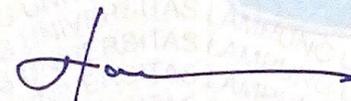
Nomor Pokok Mahasiswa : **2056071022**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

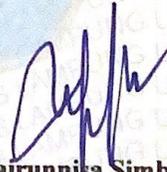
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Hasbi Sidik, S.I.P., M.A.

NIP. 197912302014041001



Khairunnisa Simbolon, S.I.P., M.A.

NIP. 199209262023212049

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**



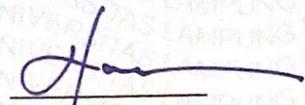
Simon Sumanjowo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

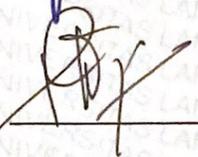
Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**



Penguji Utama: **Luerdi, S.IP., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.,

NIP. 19760821 200603 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Oktober 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 02 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Zuleika Zihny Madtara

NPM. 2056071022

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Zuleika Zihny Madtara. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 November 2002. Penulis merupakan anak pertama, dari Bapak Muhammad Saihu, S.E dan Ibu Tri Kuntari, S.E. Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal pertama di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Az Zahra Bandar Lampung, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bandar Lampung, dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung.

Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa program pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat). Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik di luar kampus seperti Program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran yang bekerjasama dengan Microsoft pada tahun 2021, dan Program *Virtual Internship* dari Erajaya tahun 2022. Selain itu, penulis mengikuti magang mandiri di Kantor Hukum WFS (Wahrul Fauzi Silalahi) dan rekan tahun 2022 dan program magang yang dilaksanakan oleh jurusan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan pada tahun 2023.

MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. ”

(Al- Insyirah: 6)

“ Do not let one worry make you forget a thousand blessing. ”

“Every page you turn is a step closer to your dreams.

Keep studying, keep striving.”

“ Tidak ada yang menyakitimu kecuali itu pikiranmu. Tidak ada yang membatasimu kecuali ketakutanmu. Tidak ada yang mengendalikan kamu kecuali itu keyakinanmu.”

- Jalaluddin Rumi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat, karunia, hidayah dan rahmat-Nya yang diberikan, shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan Akhlaqul Kharimah yang kita nantikan syafa 'at-nya di hari akhir kelak. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua saya,

Papa Muhammad Saihu dan Mama Tri Kuntari, terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti selama ini. Terima kasih telah mendidik, membimbing, dan memotivasiku untuk menggapai mimpi dan cita-cita dengan sepenuh hati dan doa-doa tulus yang kalian panjatkan untukku selalu menjadi pelindung dalam setiap langkahku. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, melindungi setiap langkah, dan memberikan keberkahan atas segala kebaikan yang telah Papa dan Mama berikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT sebab atas berkah dan rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi yang berjudul "Kepentingan Nasional Indonesia Era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Tahun 2014-2019" sebagaimana merupakan salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Melalui kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah bersedia dan berkenan dalam membimbing, memberikan saran dan nasihat, motivasi, mengarahkan, dan menyempatkan waktunya untuk membantu penulis selama menyelesaikan skripsi;
4. Mbak Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang senantiasa membantu penulis dengan penuh kesabaran, membimbing, memberikan kepercayaan dan masukan terhadap penulis dalam pengerjaan skripsi;
5. Bapak Luerdi, S.IP., M.Si., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan wawasan baru, nasihat, dan saran agar skripsi penulis menjadi lebih baik dan layak;

6. Seluruh dosen dan staf Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah membantu penulis dalam memberikan banyak wawasan, ilmu, pengalaman dan waktu kepada penulis sejak awal perkuliahan;
7. Orang tua penulis, Papa Muhammad Saihu dan Mama Tri Kuntari yang tidak pernah berhenti memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, kesabaran yang tulus dan ikhlas dalam membesarkan, mendidik, membimbing, tidak pernah lelah mendoakan, mendengarkan keluh kesah, memotivasi, memberikan semangat, mendukung, dan memeluk saya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah papa dan mama berikan, semoga penulis kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan papa dan mama;
8. Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan harapannya, semoga penulis dapat membanggakan kalian kelak.
9. Teman baik penulis, Rahmat Iqbal Marga, yang telah memberikan perhatian, mendoakan, mengingatkan, membantu, memotivasi, mendukung, serta selalu berusaha meluangkan waktu ditengah kesibukan menjalani pendidikan untuk menemani, mendengarkan, dan memahami keluh kesah penulis. Terima kasih telah berusaha selalu memberikan warna dan menjadi bagian dari segala proses penulis.
10. Sahabat terbaik penulis, Maharani Nurhadijah Rahman, yang selalu menyempatkan waktu dalam memberikan semangat, dukungan, motivasi, nasihat, saran dan tidak pernah bosan mendengarkan dan memahami keluh kesah penulis tentang semua hal tanpa rasa khawatir. Terima kasih selalu menjadi sahabat terbaik penulis;
11. Sahabat perkuliahan penulis, Anggia Fransisca Situmorang dan Zahra Kesuma, yang sudah berjuang bersama dari awal perkuliahan, selalu mendukung, memberikan tawa, mendengarkan banyak cerita yang penting maupun tidak penting, dan selalu berusaha membantu penulis. Terima kasih atas kebersamaan, kenangan, dan waktu yang selalu kita lewati bersama hingga akhir perkuliahan;

12. *Myself, Zuleika Zihny Madtara, I would like to thank myself for working hard to complete this thesis. Thank me for persevering through difficult times, thank me for always striving to become a better version of myself, and thank me for fighting earnestly without giving up;*
13. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi;
14. Alamamater Tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 Oktober 2024

Zuleika Zihny Madtara
NPM. 2056071022

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR GAMBAR.....	i
DAFTAR SINGKATAN	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teoritis	10
2.2.1 Teori Kepentingan Nasional.....	11
2.3 Kerangka Pemikiran	14
III. METODE PENELITIAN	16
3.1 Tipe Penelitian	16
3.2 Fokus Penelitian.....	17
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data	18
3.5 Teknik Analisis Data	19
3.5.1 Kondensasi Data	19
3.5.2 Tampilan Data	20
3.5.3 Pengambilan dan Pemvalidasian Kesimpulan	21
IV. PEMBAHASAN	22
4.1 Deskripsi Konflik di Laut Natuna Utara	22
4.1.1 Profil Laut Natuna Utara	22
4.1.2 Klaim Tiongkok	25
4.1.3 Konflik di Laut Natuna Utara	29
4.1.4 Respon Indonesia.....	35

4.2 Penjelasan Kepentingan Nasional Indonesia Era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara	46
4.2.1 Kebijakan Presiden Joko Widodo	46
4.2.2 Kepentingan Nasional Indonesia di Laut Natuna Utara	52
4.2.3 Kepentingan Pertahanan	56
4.2.4 Kepentingan Ekonomi	63
4.2.5 Kepentingan Tata Internasional	68
4.2.6 Kepentingan Ideologi.....	71
V. KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Peta Letak Kepulauan Natuna	1
Gambar.2 Peta <i>Nine Dash Line</i>	3
Gambar.3 Kerangka Pemikiran	15
Gambar.4 Posisi Strategis Laut Natuna Utara	23

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
EIA	: <i>Environmental Impact Assessment</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
IHO	: <i>International Hydrographic Organization</i>
IMO	: <i>International Maritime Organization</i>
KHL	: Komite Hidrografi Laut
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LNU	: Lembaga Nasional Utama
LTS	: Laut Teritorial dan ZEE
MEF	: <i>Minimum Essential Force</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMD	: Poros Maritim Dunia
Pushidrosal	: Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
TEU	: <i>Twenty-foot Equivalent Unit</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
WPP RI	: Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki wilayah lautan yang sangat luas, perbatasan pantai terpanjang, objek wisata laut, keanekaragaman hayati laut bahkan Indonesia dijuluki sebagai *marine mega-biodiversity* dengan berbagai spesies terbesar seperti ikan, terumbu karang, dan rumput laut (Hidayat, 2017). Menurut Pusat Hidro Oceanografi Angkatan Laut, luas perairan Indonesia adalah 6.400.000 km², sedangkan luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan dan perairan adalah 8.300.000 km² dengan Garis pantai Indonesia memiliki panjang 108.000 km (Pushidrosal, 2018). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak kepulauan, salah satunya adalah Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepulauan Natuna memiliki kawasan yang disebut dengan Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara terletak di utara Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perairan ini berbatasan di utara dengan Selat Karimata serta dengan laut Singapura, Vietnam, dan Malaysia.



Gambar 1. Peta Letak Kepulauan Natuna
(Menpan, 2020)

Laut Natuna Utara terletak di antara Kalimantan dan Semenanjung Malaysia, serta mencakup bagian selatan Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, laut ini juga berbatasan dengan bagian selatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam dan Malaysia, menjadikannya wilayah perairan yang strategis dan kompleks dari segi geopolitik maritim (Natunakab, 2013). Dalam ZEE serta landas kontinen Indonesia mempunyai hak berdaulat dalam mengelola serta mendayagunakan SDA (Sumber Daya Alam) pada wilayah tersebut dari Indonesia juga mempunyai menentukan perairan kepulauan yang berada pada garis pangkal kepulauan serta perairan pedalaman di wilayah tersebut. Hak-hak ini ditentukan pada UNCLOS 1982 sebagaimana telah dilakukan ratifikasi oleh Indonesia melalui UU nomor 17 tahun 1985, wilayah Laut Natuna Utara termasuk dalam ZEE Indonesia. Dalam zona ini Indonesia mempunyai hak kedaulat dalam melaksanakan eksploitasi, eksplorasi, konservasi serta manajemen SDA hayati maupun non hayati melalui dasar laut serta tanah di bagian bawah, termasuk perairan di atasnya. Selain itu, Indonesia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi lain contohnya pembangkit tenaga melalui angin, air, dan arus (Joko, 2005).

Namun, pada tahun 1947, terjadi sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan Tiongkok sebagai aktor utama. Tiongkok mengajukan klaim terhadap wilayah tersebut melalui peta yang dikenal sebagai *Nine Dash Line*. *Nine Dash Line* merupakan sebuah peta teritorial yang menandai batas wilayah secara imajiner dengan menggunakan sembilan garis putus-putus, dengan tujuan untuk mengklaim sebagian besar perairan Laut Tiongkok Selatan, yakni sekitar 90% dari wilayah tersebut (Suastha & Dewi, 2016). Tiongkok menggunakan klaim sejarah kuno untuk mendukung klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan, merujuk pada penemuan oleh Dinasti Han pada abad ke-2 Masehi. Klaim ini pertama kali diajukan oleh pemerintah Nasionalis Tiongkok pada tahun 1947, kemudian pada tahun 1953 disederhanakan menjadi *Nine Dash Line* setelah penghilangan dua garis di sekitar Teluk Tonkin (Shabrina, 2017). Tiongkok mengklaim bahwa pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan termasuk dalam wilayah teritorialnya berdasarkan batas *Nine Dash Line*. Klaim ini memicu tanggapan tegas dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Taiwan, Vietnam, dan Brunei

Darussalam, karena mereka juga menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari kepentingan mereka (Goh, 2005).



Gambar 2. Peta *Nine Dash Line*
(Tiongkocusfocus, 2015)

Laut Tiongkok Selatan mencakup area seperti Kepulauan Paracels, Spratly, Karang Scarborough, dan Dangkanan Macclesfield dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Ini mencakup 39% dari wilayah laut Asia Tenggara dan sekitar 2,5% dari total luas lautan dunia (Ruyat, M.Eng, 2017). Wilayah ini merupakan salah satu perairan terbesar di dunia dan memiliki posisi strategis dalam hal ekonomi, politik, serta keamanan. Oleh karena itu, kawasan ini memiliki potensi besar untuk kerja sama antarnegara. Laut Tiongkok Selatan juga kaya akan sumber daya alam. Berdasarkan data dari United States Energy Information Administration (EIA), kawasan ini memiliki cadangan minyak sebesar 11 miliar barel dan cadangan gas alam mencapai 190 triliun kaki kubik. Sumber daya hidrokarbon di wilayah ini sangat penting sebagai pasokan energi. Selain itu, menurut konsultan energi Wood Mackenzie, terdapat tambahan cadangan minyak dan gas sebesar 2,5 miliar barel di kawasan tersebut (Muhammad & Maksum, 2016). Laut Tiongkok Selatan terdiri dari ratusan pulau kecil, sebagian besar tidak berpenghuni dan menjadi sengketa di antara negara-negara sekitarnya.

Klaim tumpang tindih dilakukan oleh Tiongkok pada sejumlah pulau di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan peta *Nine Dash Line*. Pada tahun 1909, Tiongkok merebut Pulau Xisha (Paracel), dan pada tahun 1946, Pulau Itu Aba (Spratly) serta Pulau Phu Lan (Paracel) juga menjadi wilayah yang diklaim. Agresivitas Tiongkok berlanjut pada tahun 1950-an dengan merebut Pulau Hoang

Sa (Paracel), yang kemudian diulangi pada tahun 1974 melalui tindak kekerasan. Selain klaim kedaulatan, keberadaan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi di Kepulauan Spratly dan Paracel diyakini menjadi faktor utama sengketa. Konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan, terutama di Kepulauan Spratly, memuncak pada 1970-an setelah krisis minyak 1973, menyebabkan ketegangan antara negara-negara di sekitar wilayah tersebut. Berbagai insiden bersenjata terjadi, seperti antara Tiongkok dan Vietnam di Johnson South Reef pada 1988, pendudukan Tiongkok atas Karang Mischief pada 1995, serta baku tembak antara kapal perang Tiongkok dan Filipina di dekat Pulau Campones pada 1996. Insiden-insiden ini menunjukkan bahwa sengketa di Laut Tiongkok Selatan berpotensi memicu konflik terbuka kapan saja (Parandaru, 2024).

Indonesia awalnya tidak terlibat pada masalah Laut Tiongkok Selatan. Indonesia mulai terlibat setelah Tiongkok mengklaim perairan Natuna pada kabupaten Natuna menjadi bagian dari klaim *Nine Dash Line*. Klaim ini memicu protes tegas dari Indonesia terhadap tindakan Tiongkok yang tanpa izin memasukkan wilayah perairan kabupaten Natuna ke dalam daerah maritimnya. Ketidaksetujuan Indonesia terhadap klaim *Nine Dash Line* di Laut Tiongkok Selatan berdampak pada berkurangnya kedaulatan Indonesia terkait wilayah ZEE pada kepulauan Natuna dan kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran atas gangguan stabilitas keamanan perairan Indonesia maupun pendayagunaan sumber daya melalui ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara (Novianto et al., 2020).

Vietnam sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah pada kawasan Laut Tiongkok Selatan merespon ZEE Indonesia di Laut Tiongkok Selatan ditandai dengan kesepakatan untuk menggambarkan batas-batas maritim mereka, yang mengakhiri negosiasi selama 12 tahun. Kesepakatan ini, ditandatangani pada bulan Desember 2022, bertujuan untuk menyelesaikan klaim ZEE yang tumpang tindih dan meningkatkan hubungan bilateral, khususnya terkait masalah penangkapan ikan ilegal. Kedua negara memandang hal ini sebagai langkah strategis terhadap klaim ekspansif Tiongkok di kawasan tersebut, yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap norma-norma maritim internasional berdasarkan UNCLOS (Strangio, 2022).

Pada pertengahan tahun 2017, tepatnya bulan Juli, Presiden Joko Widodo melalui pemerintah di Indonesia melaksanakan pembaharuan atas daerah perairan NKRI, di mana salah satu langkah yang diambil adalah mengubah nama wilayah perairan Natuna. Laut Natuna Utara adalah istilah yang diterapkan untuk merujuk kepada Natuna bagian utara yang memiliki perbatasan langsung terhadap laut Tiongkok Selatan dan pemilihan nama ini didasarkan pada penggunaan umum oleh industri migas aktif pada daerah tersebut untuk aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi minyak dan gas (Antara News, 2017). Perubahan nama yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai kedaulatan, dasar hukum, serta keamanan bagi penduduk di wilayah Natuna. Dengan harapan di masa mendatang, tindakan ini akan mencegah klaim sepihak dari negara lain terhadap wilayah perairan tersebut (Sutari, 2019).

Pendekatan pemerintah Indonesia atas mekanisme penyelesaian konflik pada laut Tiongkok Selatan sudah berganti yang awalnya pendekatan politik aktif dengan upaya mencari penyelesaian dari konflik. Meskipun Indonesia adalah negara bukan pengklaim atau *non claimant state* namun perlahan sikap Indonesia mulai berubah ketika era pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan pemerintahan Joko Widodo difokuskan untuk melindungi kepentingan Indonesia pada area kepulauan Natuna dan berupaya semaksimal mungkin untuk meredam konflik lebih lanjut dengan Tiongkok. Kebijakan luar negeri di Indonesia ini mengalami perubahan sebab adanya optimalisasi intensitas maritim yang dilanggar oleh Tiongkok pada daerah perairan kepulauan Natuna.

1.2 Rumusan Masalah

Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982 merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Namun, terjadi klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap peta *Nine Dash Line* salah satunya meliputi wilayah Laut Natuna Utara. Klaim *Nine Dash Line* juga menyebabkan terjadinya konflik tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan terhadap negara-negara di kawasan seperti Malaysia, Filipina, Taiwan, Vietnam, dan Brunei Darussalam karena dianggap telah merugikan kepentingan mereka yang juga mengklaim sebagian

wilayah Laut Tiongkok. Pemerintah Indonesia era pemerintahan Presiden Joko Widodo dikatakan sebagai pemerintah yang memperlihatkan paradigma baru yang lebih aktif bahkan menjadi negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Berangkat dari perubahan sikap tersebut, peneliti berasumsi bahwa Indonesia memiliki kepentingan tersendiri untuk terlibat dalam konflik yang terjadi Laut Tiongkok Selatan sehingga memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana Kepentingan Nasional Indonesia Era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konflik yang terjadi Laut Natuna Utara.
2. Menjelaskan kepentingan nasional Indonesia Era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami teori kepentingan nasional, khususnya terkait dengan Kepentingan Nasional Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di wilayah Laut Natuna Utara. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik pada isu-isu kemaritiman dan kepentingan nasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai upaya untuk mengidentifikasi perbandingan serta memunculkan ide-ide baru. Penelitian sebelumnya memberikan landasan bagi peneliti untuk melanjutkan kajian dengan topik serupa dan menambah kebaruan dalam penelitian. Bagian ini mencakup pengumpulan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas, baik dari publikasi yang sudah terbit maupun yang masih dalam proses. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang dipilih penulis, yaitu “Kepentingan Nasional Indonesia Era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara.”

Pertama, Sekar Tanjung Ajita, Syamsunasir, dan Bayu Setiawan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan konsep kepentingan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan beberapa negara seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan masih belum terpecahkan. Meskipun Indonesia tidak mengklaim wilayah tersebut, kepentingan strategisnya di Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan laut itu tetap ada. Indonesia memiliki dua kepentingan utama: kelangsungan hidup negara dan kedaulatan serta stabilitas regional. Kedua kepentingan ini saling terkait dengan dinamika sengketa dan dapat ditangani melalui pendekatan kekuatan lunak dan keras (Ajita et al., 2021).

Kedua, Rio Yusri Maulana, dan Moh. Arief Rakhman, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan teori kepentingan nasional dan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laut Natuna Utara, yang sebelumnya dikenal dengan nama berbeda, berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Perubahan

nama ini merupakan respons terhadap klaim sepihak Tiongkok, yang mendorong Indonesia memperkuat kehadiran militernya di Natuna. Penelitian ini menyoroti risiko yang dihadapi Indonesia dalam hal stabilitas politik, serta keseimbangan antara pendekatan lunak dan keras dalam mengelola konflik di wilayah tersebut (Maulana & Rakhman, 2020).

Ketiga, Fahri Wijaya Gunawan, Dina Aulia, Andriyana, Nandika Rahman Fajar, dan Diki Jafar Sidiq, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, dengan menggunakan teori interdependensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok dalam konflik di Laut Natuna berlangsung secara independen. Teori interdependensi menunjukkan bahwa perdamaian dapat dicapai melalui saling ketergantungan. Meskipun ada kerjasama di berbagai sektor, klaim Tiongkok atas Laut Natuna, yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia, tetap menjadi sumber konflik (Gunawan et al., 2023).

Keempat, Miftahuddin, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan konsep poros maritim dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo memperkenalkan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia untuk menjadikan Indonesia negara maritim yang kuat dan berdaulat. Konsep ini menyatukan pandangan Indonesia tentang kepulauan dalam aspek ekonomi, politik, dan keamanan. Implementasi visi ini terlihat dalam regulasi presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan Kabupaten Natuna sebagai pusat strategis pembangunan (Miftahuddin, 2024).

Kelima, Yugolastarob Komeini, Nurmasari Situmeang, dan Fadra, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan konsep geopolitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia merespons tantangan geopolitik untuk melindungi kedaulatan dan sumber daya laut di Natuna. Faktor sejarah yang digunakan oleh Tiongkok mempengaruhi kedaulatan Indonesia. Sebagai langkah geopolitik, Indonesia mengubah nama wilayah dan merancang peta baru untuk mengatasi ancaman ini, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan geopolitik demi kepentingan nasional (Komeini & Situmeang, 2018).

Keenam, Yuli Ari Sulistyani, Marina Ika Sari, dan Andhini Citra Pertiwi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan konsep

kepentingan nasional dan geostrategi dan geopolitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2010, Indonesia terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan akibat klaim Tiongkok di Natuna. Di bawah pemerintahan Joko Widodo, Indonesia menggunakan diplomasi dan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Pemerintah terus meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk mencari solusi damai dan menciptakan stabilitas di ASEAN (Sulistiyani et al., 2021).

Ketujuh, Aaron L Connelly, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori diplomasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di bawah Joko Widodo, Indonesia lebih cenderung menggunakan tindakan sepihak untuk memperkuat posisinya di Natuna. Namun, diplomasi Indonesia di ASEAN terkait Laut Tiongkok Selatan belum efektif, terutama karena sikap non-blok dan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Tiongkok demi investasi (Connelly, 2016).

Kedelapan, Ramdhan Muhaimin, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori sekuritisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian peta baru NKRI pada tahun 2017, termasuk penamaan ulang wilayah perairan di utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara, memicu protes dari Tiongkok. Meskipun hubungan bilateral belum terganggu, langkah ini menunjukkan upaya Indonesia untuk menjaga kedaulatan maritimnya. Pembuatan peta baru melibatkan sumber daya nasional dan pernyataan diplomatik serta merupakan kelanjutan dari usaha mempertahankan kedaulatan maritim sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 (Muhaimin, 2018).

Kesembilan, Miss Febrianti Tentyana S Tarno, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Joko Widodo mengalami perubahan terkait sengketa Natuna dan ambisi menjadi Poros Maritim Dunia. Meskipun sikap netral Indonesia dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan terlihat ambigu, penelitian menegaskan bahwa ini merupakan bagian dari identitas yang terkonstruksi. Tantangan bagi pemerintahan

Joko Widodo adalah mewujudkan visi ini sambil mempertahankan kedaulatan dan peran mediasi di kawasan (Tarno, 2017).

Kesepuluh, Poltak Partogi Nainggolan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori *balance of power*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons beragam negara Asia Tenggara terhadap Poros Maritim Dunia yang diusung Joko Widodo. Walaupun banyak negara mendukung proposal infrastruktur maritim, ketegangan muncul ketika Indonesia menerapkan penegakan hukum tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Koordinasi antar lembaga dan upaya diplomasi diperlukan untuk menghindari kompleksitas dalam penegakan hukum, dengan memperkuat peran Bakamla dan pembentukan Komisi Maritim oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai mitra efektif (Nainggolan, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan yang ditemukan oleh penulis di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Pada persamaan penelitian, terletak pada pembahasan mengenai konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara dan kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara. Terdapat juga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yaitu pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menyoroti keaktifan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Keaktifan itu sendiri akan dideskripsikan melalui kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara. Penelitian ini juga berupaya untuk memperbanyak penelitian terkait kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara Era Presiden Joko Widodo menggunakan teori kepentingan nasional (*national interest*) dan peneliti menjelaskannya melalui indikator kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein.

2.2 Landasan Teoritis

Studi Hubungan Internasional menggunakan berbagai teori sebagai dasar untuk menganalisis peristiwa masa kini, masa lalu, dan masa depan. Dalam penelitian ini, teori kepentingan nasional digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan

nasional Indonesia di Laut Natuna Utara pada Era Presiden Joko Widodo. Pemilihan teori ini membantu memberikan panduan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

2.2.1 Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan teori dasar yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri setiap negara. Istilah ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat untuk menggambarkan, membenarkan, atau menentang kebijakan luar negeri. Kedua, sebagai sarana analisis untuk memahami dan menjelaskan perilaku negara di tingkat internasional. Kepentingan nasional yang menjadi landasan kebijakan luar negeri umumnya berfokus pada akuisisi kekuasaan, yang memungkinkan negara tersebut mempengaruhi atau mengendalikan negara lain. Kepentingan nasional juga berkaitan erat dengan prinsip penentuan nasib sendiri, yang memberi hak kepada kelompok nasional untuk mengatur diri sendiri dan membentuk komunitas politik yang mandiri, di mana kedaulatan terletak pada negara tersebut. Dalam hubungan internasional modern, kebijakan negara tidak lagi diputuskan oleh kepentingan pribadi penguasa, tetapi oleh kepentingan dan ambisi bangsa secara keseluruhan (Carr, 1945).

Hadirnya kepentingan nasional datang melalui eksistensi kedudukan sebuah negara dengan keperluan tersebut bisa ditinjau melalui keadaan internal yakni militer, sosial budaya, politik hingga ekonomi. Kepentingan tersebut hadir berdasarkan kekuatan atau kekuasaan yang hendak diciptakan dengan orientasi suatu negara mampu mencapai pengakuan dunia akibat kepentingan nasional tersebut dan peranannya untuk menjadi suatu modal dasar dalam merancang kebijakan luar negeri sehingga kepala negara bisa diterapkan untuk memaparkan perilaku politik pada sebuah negara (Sitepu, 2011).

Daniel S. Papp mendefinisikan kepentingan nasional sebagai tujuan yang dicapai untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Dua aspek utama kepentingan nasional adalah keamanan, yang mencakup kelangsungan hidup rakyat dan wilayah, serta kesejahteraan. Kedua

aspek ini, keamanan dan kesejahteraan sangat penting bagi setiap negara (Papp, 1988). Sementara itu, Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan utama yang memandu pembuat kebijakan luar negeri. Konsep ini sangat luas, namun esensial bagi suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan nasional meliputi kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan, kesejahteraan ekonomi, dan keamanan militer (Plano & Olton, 1982).

Hans J. Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional menjadi kapabilitas dasar oleh sebuah negara dalam mempertahankan, memproteksi, dan melindungi identitas fisik, politik, serta budaya atas ancaman negara lain. Melalui kepentingan nasional negara hendak mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil kebijakan baik lewat kerjasama dan konflik. Kepentingan nasional tak ditetapkan dari kemauan individu atau pihak yang terlibat melainkan negara perlu menggunakan kapabilitas nasionalnya untuk menentukan kebijakan luar negeri (Morgenthau et al., 1997). Menurut Nuechterlein, kepentingan nasional adalah keadaan di mana keinginan dan kebutuhan suatu negara berdaulat dipengaruhi oleh interaksi dengan negara lain dan faktor eksternal (Nuechterlein, 1976). Menurut Scott Burchill, kepentingan nasional dapat digunakan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri dan sebagai alat analisis untuk memahami perilaku negara dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional juga membentuk tindakan politik, seperti mempertahankan, mengusulkan, atau menentang kebijakan (Burchill, 2005).

Kepentingan nasional merupakan berbagai tujuan yang hendak diraih oleh keperluan suatu hubungan negara maupun bangsa serta cita-cita yang hendak diwujudkan. Secara minimal hal tersebut meliputi integritas wilayah, keberlangsungan hidup bangsa, dan kemerdekaan. Namun, definisi tentang keberlangsungan hidup nasional dapat bervariasi bergantung pada keadaan yang telah ditangani oleh setiap negara (Dougherty & Robert L, 1971). Kepentingan nasional sering menjadi ukuran utama untuk para pengambil kebijakan di setiap negara sebelum melakukan tindakan atau sikap. Setiap langkah dalam kebijakan luar negeri perlu disandarkan terhadap kepentingan nasional serta ditujukan dalam

meraih maupun memproteksi hal-hal yang dianggap menjadi kepentingan nasional (Rudy, 2002).

Setiap negara mempunyai kepentingan nasional yang meliputi keamanan, kebahagiaan, kebebasan, kesejahteraan, kemerdekaan, kedaulatan, keterlibatan, keadilan, dan kemakmuran. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran ini bergantung pada seberapa pentingnya sasaran tersebut bagi negara tersebut. Kepentingan nasional dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan terkait kapabilitas negara, yang kemudian terintegrasi dalam kekuasaan. Kekuasaan ini memiliki peran krusial dalam menjalankan strategi untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam merumuskan kepentingan nasional, pencapaian tujuan kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh peluang dan kendala yang terdapat di lingkungan eksternal. Para pengambil keputusan harus cermat dalam menganalisis dan mengidentifikasi peluang serta kendala yang ada, sehingga dapat memaksimalkan peluang di tengah persaingan global yang semakin ketat, sembari meminimalkan kendala yang ada maupun yang mungkin terjadi (Kadir & Triwahyuni, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein dalam buku berjudul “National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making”. Donald E. Nuechterlein menyatakan bahwa dalam perspektif hubungan internasional, tindakan suatu negara terhadap negara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya masing-masing (Nuechterlein, 1976). Nuechterlein membagi kepentingan nasional menjadi empat indikator yaitu:

1. *Defence Interest* atau Kepentingan Pertahanan, meliputi perlindungan negara dan warganya dari ancaman kekerasan fisik yang datang dari negara lain, serta ancaman yang berasal dari luar terhadap sistem pemerintahannya.
2. *Economic Interest* atau Kepentingan Ekonomi, berfokus pada peningkatan kesejahteraan atau ekonomi negara.
3. *World Older Interest* atau Kepentingan Tata Internasional, berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi

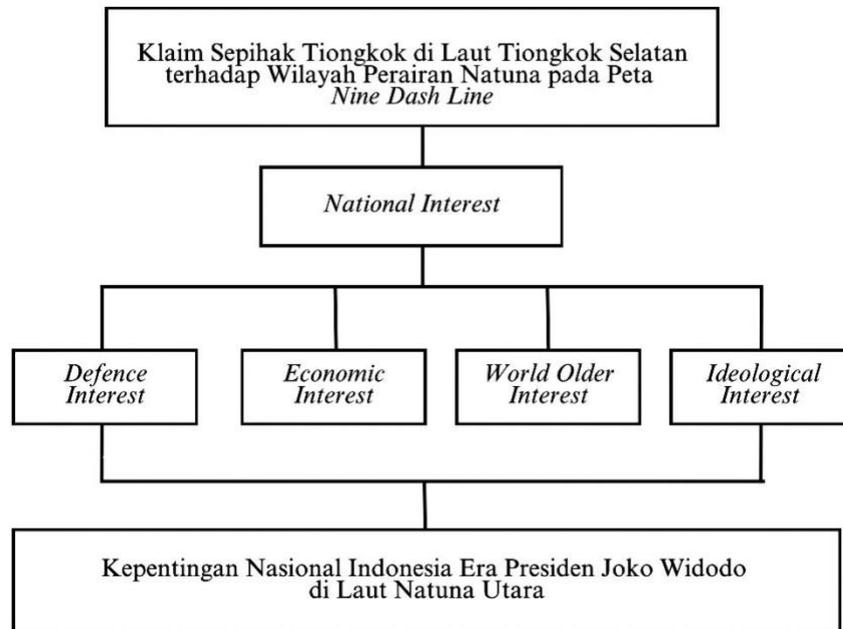
internasional yang menguntungkan bagi negara dan warganya dalam bertransaksi dengan pihak atau negara lain.

4. *Ideological Interest* atau Kepentingan Ideologi, mengacu pada perlindungan atau pertahanan ideologi negara dari ancaman ideologi negara lain.

Peneliti memanfaatkan indikator analisis dari Indikator dari Donald E. Nuechterlein karena relevan dengan kepentingan nasional Indonesia era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara karena kerangka tersebut secara sistematis mencakup aspek-aspek utama yang menjadi motivasi di balik kepentingan nasional Indonesia era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kepentingan nasional di Indonesia selaras dengan posisi strategis Laut Natuna Utara.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mengidentifikasi kepentingan nasional Indonesia era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Terjadinya klaim sepihak Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan melalui peta *Nine Dash Line* menyebabkan beberapa negara kawasan termasuk Negara Indonesia bersinggungan terhadap wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal tersebut memicu konflik antar negara karena masing-masing negara mementingkan kepentingannya. Wilayah Laut Natuna Utara merupakan salah satu kawasan yang bersinggungan dengan klaim Tiongkok tersebut. Pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo merespon klaim Tiongkok dengan tujuan untuk kepentingan nasional. Peneliti akan menggunakan bantuan dari teori kepentingan nasional (*national interest*) menurut Donald E. Nuechterlein dengan menggunakan indikator analisis *defence interest*, *economic interest*, *world order interest*, and *ideological interest* sehingga dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Melalui penjelasan tersebut, maka penelitian ini menghasilkan kerangka pemikiran, sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

(Sumber : diolah oleh peneliti)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tipe kualitatif deskriptif. Tipe penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada penggunaan deskripsi verbal daripada mengandalkan angka atau kuantifikasi dalam proses analisis dan pengumpulan data. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan menjelaskan secara detail deskriptif. Dengan fokus pada kata-kata dan narasi, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas dan konteks dari subjek penelitian dengan lebih baik, serta menyediakan ruang bagi interpretasi yang lebih luas dan mendalam terhadap data yang diperoleh (Bryman, 2012).

Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penulis menganggap lebih sederhana dan memudahkan proses penelitian. Dalam metode penelitian kualitatif, data yang digunakan penulis berupa pernyataan tertulis atau lisan, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian. Penelitian kualitatif memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang masalah yang diteliti, sehingga memperkaya pemahaman penulis tentang fenomena tersebut. Selain itu, dengan metode ini, penulis dapat mendeskripsikan peristiwa secara cermat, logis, dan objektif. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan peneliti untuk dapat menjelaskan kepentingan nasional Indonesia era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini melibatkan banyak topik di dalamnya baik dari pendeskripsian permasalahan penelitian hingga penganalisisan bahasan inti permasalahan itu sendiri, maka dari itu penting bagi penelitian ini untuk memuat fokus penelitian, yakni melakukan analisis mengenai kepentingan nasional Indonesia era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara dengan dengan batasan waktu pada periode pertama Presiden Joko Widodo, yakni dari tahun 2014 hingga 2019. Selain itu, penelitian ini akan berfokus pada teori kepentingan nasional dengan indikator analisis *defence interest*, *economic interest*, *world older interest*, and *ideological interest* menurut Donald E. Nuechterlein, atas kepentingan nasional Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mempunyai definisi sebagai data yang dikumpulkan atau dianalisis oleh penelien terdahulu. Analisis data ini umumnya dilakukan oleh individu lain atau peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian terkait sebuah topik (Bryman, 2012). Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah melalui triangulasi sebagai pendekatan untuk mengumpulkan data. Triangulasi melibatkan penggunaan lebih dari satu sumber data dalam analisis peristiwa tertentu. Triangulasi membantu peneliti dalam mengumpulkan data dari beberapa sumber yang berbeda, yang fokusnya terutama pada metode analisis dan sumber data yang digunakan (Bryman, 2012).

Adapun triangulasi sumber data itu sendiri berasal dari beberapa laman daring yang tidak hanya mengandalkan sumber data tunggal. Setelah peneliti mengumpulkan seluruh data, peneliti akan meninjau dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori. Data yang tidak relevan akan dieleminasi, sementara yang relevan akan dijadikan sebagai informasi tambahan. Dalam penelitian ini,

peneliti memperoleh sumber data dari berbagai penelitian terdahulu baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, website resmi pemerintah Indonesia seperti pernyataan pers dari Kementerian Luar Negeri (www.kemlu.com), pernyataan pers dan dokumen resmi sidatik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk (www.kkp.go.id), pernyataan pers dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (www.kominfo.go.id), berita terkini dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (www.setkab.go.id), berita terkini dari Kementerian Sekeretariat Negara Republik Indonesia (www.setneg.go.id), berita terkini dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (www.menpan.go.id), data kelautan dari Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (www.ihdc.pushidrosal.tnial.mil.id), dokumen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (www.bphn.com), dan berita terkini dari Natunakab (www.natunakab.go.id). Selain itu, peneliti memperoleh hasil pidato, wawancara, dan data melalui laman daring atau media berita online seperti seperti Kompas, British Broadcasting Corporation (BBC), Tiongkok Daily Mail, Deutsche Welle (DW), Antara Babel, Jakarta Post, Antara News, Kata Data, Cable News Network (CNN), Maritim News, Republica, Berita Satu, Okezone, Koran Tempo, iNews, dan Kontan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menerapkan metode dokumentasi kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penyelidikan mendalam terhadap berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk dokumen publik seperti hasil rapat, artikel surat kabar, situs web resmi, undang-undang, peraturan, dan laporan resmi pemerintah. Selain itu, penulis juga memperoleh dokumen-dokumen yang bersifat lebih pribadi atau tertutup, seperti buku harian, jurnal pribadi, surat, maupun email (Cresswell & Cresswell, 2018).

Pada penelitian ini sendiri penulis mengumpulkan data dokumen melalui literatur buku, hasil rapat, laporan resmi dari sejumlah lembaga negara maupun

laman resmi, berita, majalah, undang-undang, peraturan negara maupun non negara, artikel-artikel daring, serta hasil rapat dari sejumlah organisasi internasional dan juga negara. Data-data ini kemudian digunakan peneliti untuk mencari dan menjelaskan kepentingan nasional Indonesia era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Meskipun terdapat banyak data yang peneliti dapatkan mengenai topik ini, namun peneliti melakukan pengelompokan data untuk mempermudah analisis yang disusun berdasarkan fokus peneliti yaitu melakukan analisis mengenai kepentingan nasional Indonesia era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara dengan dengan batasan waktu pada periode pertama Presiden Joko Widodo tahun 2014 hingga 2019.

3.5 Teknik Analisis Data

Terdapat tiga tahapan yang digunakan penulis untuk menganalisis data, yaitu kondensasi data, tampilan data dan terakhir penarikan kesimpulan atau pemverifikasian (Miles et al., 2014).

3.5.1 Kondensasi Data

Kondensasi data atau yang dapat juga disebut sebagai pemadatan data, ini mengarah pada prosedur penentuan, pengkonsentrasian, simplifikasi, pengabstrakan dan juga proses transfer sebuah data yang hadir pada sebuah catatan tertulis yang timbul pada saat di lapangan atau saat penelitian, skrip wawancara, dokumen, serta data nyata yang lain. Melalui kondensasi, diyakini dapat menjadikan suatu data menjadi lebih kokoh. Kondensasi data sendiri merupakan sebuah model analisis yang dapat mengasah, menyeleksi, mengkonsentrasikan, menghapus serta menyusun data menjadi sebaik mungkin sampai dapat divalidasi/verifikasi dan diambil kesimpulan akhir (Miles et al., 2014).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik kondensasi data, dimana penulis telah melakukan penyeleksian terlebih dahulu mengenai

data mana yang akan diambil dan mana yang tidak perlu diambil. Setelah itu, penulis akan melakukan pengkonsentrasian mengenai topik yang akan diteliti yakni mengenai kepentingan nasional Indonesia era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Lalu, penulis akan menghapus data-data yang dirasa kurang sesuai dengan pengkonsentrasian tersebut dan selanjutnya penulis akan menyusun data-data yang telah di analisis untuk ditulis di dalam penelitiannya agar lebih berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

3.5.2 Tampilan Data

Pada dasarnya, tampilan merupakan sekelompok informasi yang tersusun dan tersederhanakan yang nantinya dapat dilakukan untuk mengambil kesimpulan dan respons. Tampilan data yang bagus dan baik merupakan kunci utama pada teknik analisis data kualitatif yang kokoh. Tampilan direncanakan agar dapat memperoleh informasi yang tersusun secara lebih sederhana serta dapat digunakan secepatnya sehingga penganalisisan dapat menyimpulkan mengenai hal yang sedang dialami dan dapat mengambil kesimpulan yang dirasa perlu direvisi ataupun meneruskan ke tahapan analisis selanjutnya. Merencanakan tampilan dengan menentukan data kualitatif mana yang akan dipakai dan jenis data kualitatif apa yang perlu dipakai merupakan bagian dari analisis. Tampilan yang cenderung terorganisir dan kokoh dapat membuat analisis semakin baik (Miles et al., 2014).

Pada penelitian ini, penulis menentukan jenis data apa yang perlu dimasukkan ke dalam penelitian ini dengan segala pertimbangan seperti data mana yang lebih efektif dan akurat untuk dipakai, setelah menentukan hal tersebut barulah peneliti memasukkan data yang dirasa cocok pada penelitian ini. Selain itu juga, pada tahap menganalisis data, dari banyaknya data yang telah dianalisis oleh penulis, penulis hanya memasukkan data yang sesuai dengan topik penelitian karena dari semua data yang telah diperoleh penulis tidak seluruhnya bisa masuk ke dalam

penelitian. Pada tampilan data ini juga, penulis menampilkan beberapa datanya berupa teks naratif, gambar infografis dan peta.

3.5.3 Pengambilan dan Pemvalidasian Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan yang baik harus dapat menjaga keterbukaan mengenai pendapat dan dapat kritis pada penelitiannya, namun demikian penulis tetap dapat mengambil kesimpulan dari penelitiannya. Mungkin pada awalnya suatu kesimpulan tersebut belum jelas terlihat, namun lambat laun akan semakin jelas dan semakin logis. Tahap selanjutnya pada pengambilan kesimpulan ini adalah pemvalidasian. Peneliti perlu memvalidasi kembali dengan mengecek kembali catatan tertulis yang terdapat di dalam lapangan atau penelitian. Hal-hal yang hadir melalui data perlu dicek kembali keakuratan dan kelogisannya agar pemvalidasian tersebut muncul (Miles et al., 2014). Pada penelitian ini, setelah penulis mengambil kesimpulannya dari data-data yang telah dianalisis, penulis mengecek kembali keakuratan dan kelogisan data-data tersebut agar validitas data pada analisis dapat terbukti adanya dan data tersebut tidak hanya data sembarangan yang dipakai oleh penulis akan tetapi kebenarannya pun dapat diakui oleh penulis.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam, termasuk perairan strategis seperti Laut Natuna Utara. Laut ini merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang memberi hak kepada negara untuk mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut. Namun, Laut Tiongkok Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Tiongkok melalui peta *Nine Dash Line*, menjadi sumber sengketa antara negara-negara di kawasan, termasuk Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Meskipun Indonesia bukan pihak yang terlibat langsung dalam konflik ini, klaim Tiongkok atas perairan Natuna yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia memicu ketegangan. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mulai lebih tegas dalam melindungi kepentingan nasional di kawasan Natuna dan menghadapi klaim Tiongkok dengan kebijakan yang bertujuan menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan maritim. Pemerintahan Joko Widodo memiliki visi disebut sebagai Poros Maritim Dunia yang selaras dengan Kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara.

Penelitian ini menggunakan indikator konsep dari Donald E Nuechterlein dalam menjelaskan bagaimana kepentingan nasional Indonesia di Era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Kepentingan nasional tersebut meliputi kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional, dan kepentingan ideologi. Pada kepentingan pertahanan, Indonesia di Laut Natuna Utara sangat penting karena lokasinya yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional dan kekayaan sumber daya alamnya. Pemerintah Indonesia, di bawah Presiden Joko Widodo, berupaya memperkuat kehadiran militer di Natuna untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah, serta tetap mengedepankan pendekatan diplomasi pertahanan dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Pada kepentingan ekonomi, Kepulauan Natuna memiliki potensi ekonomi besar,

terutama dalam sektor minyak, gas, perikanan, dan pariwisata, yang sangat penting bagi ketahanan energi dan kesejahteraan nasional Indonesia. Pengelolaan wilayah ini menjadi prioritas untuk melindungi sumber daya alam yang melimpah dan memaksimalkan manfaat ekonomi. Pada kepentingan tata internasional, Indonesia berupaya untuk berperan aktif dalam mendorong penyelesaian damai sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui diplomasi dan penguatan militer, dengan fokus menjaga stabilitas regional dengan tujuan untuk mendorong negara-negara pengklaim menyelesaikan sengketa secara damai dan kooperatif. Pada kepentingan ideologi, Indonesia menjaga kedaulatan dan hak atas sumber daya laut di sekitar Kepulauan Natuna menegaskan komitmennya terhadap identitas nasional sebagai negara maritim. Ini juga memperkuat kesadaran akan nilai strategis dan budaya wilayah laut Indonesia dalam konteks pembangunan nasional dan integritas teritorial.

Penelitian mengenai kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara pada era Presiden Joko Widodo (2014-2019) menunjukkan bahwa kepentingan nasional di Laut Natuna Utara memiliki fokus utama pada upaya menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, terutama dalam menanggapi klaim sepihak oleh Tiongkok. Langkah-langkah tegas, seperti penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022, memperlihatkan komitmen Indonesia dalam mengelola kawasan tersebut secara strategis dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prioritas utama kebijakan pertahanan yang dominan pada era ini, di mana penguatan sarana dan prasarana pertahanan keamanan menjadi bagian penting dari usaha pemerintah untuk menjaga kedaulatan serta stabilitas wilayah perbatasan. Dengan demikian, fokus utama Indonesia adalah perlindungan kedaulatan dan keamanan, yang merupakan salah satu tujuan utama kebijakan nasional di kawasan ini. Selain aspek pertahanan, pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi juga menjadi prioritas utama kebijakan di Laut Natuna Utara. Potensi besar dari cadangan minyak, gas, dan sektor perikanan di kawasan tersebut menjadi faktor pendorong bagi pemerintah untuk melindungi dan memanfaatkannya bagi kepentingan nasional. Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kabupaten Natuna merupakan salah satu strategi penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah.

Di sisi lain, isu tata kelola internasional dan ideologi tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan terkait Laut Natuna Utara. Walaupun Indonesia tetap berpartisipasi dalam forum internasional dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga, keputusan yang diambil lebih berfokus pada kepentingan pragmatis, yaitu pertahanan dan ekonomi. Kepentingan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah tetapi juga memperkuat peran Indonesia sebagai poros maritim dunia, sesuai dengan visi pemerintahan Joko Widodo yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana Laut Natuna Utara memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang penting di kawasan Asia-Pasifik.

5.2 Saran

Melalui penelitian berjudul "Kepentingan Nasional Indonesia Era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara," peneliti menganjurkan beberapa saran kepada akademisi Hubungan Internasional dan peneliti lainnya yang tertarik dengan isu kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara. Peneliti menyarankan agar akademisi Hubungan Internasional yang berminat pada topik ini melanjutkan pembahasan mengenai kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara dengan menggunakan teori kepentingan nasional, baik dalam konteks kerjasama antar negara maupun upaya Indonesia di forum internasional yang belum dibahas lebih dalam dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan penelitian yang lebih baik sehingga mampu memberikan kontribusi pengetahuan secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, E. R. (2009). Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Penetapan Alur-Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Indonesian Journal Of International Law*, 6(3). <https://doi.org/10.17304/Ijil.Vol6.3.207>
- Ajita, S. T., Syamsunasir, & Setiawan, B. (2021). Indonesia's National Interest And Perspective On Conflict In South China Sea. *International Journal Of Arts And Social Science*, 4(5). www.ijassjournal.com
- Ambari, M. (2022). Begini Implementasi Ekonomi Biru Di Laut Natuna Dan Natuna Utara [Online Post]. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2022/07/19/Begini-Implementasi-Ekonomi-Biru-Di-Laut-Natuna-Dan-Natuna-Utara/>
- Anam, K. (2022). Joko Widodo Rilis Aturan, Jaga Pertahanan Dan Kedaulatan Natuna! [Online Post]. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220415082146-4-331906/jokowidodo-rilis-aturan-jaga-pertahanan-dan-kedaulatan-natuna>
- Antara News. (2014). China Klaim Wilayah Natuna [Online Post]. *Antara News*. <https://m.antaranews.com/berita/423685/china-klaim-wilayah-natuna>
- Arifianto, A. (2018). Kebijakan Indonesia Terhadap Isu Konflik Blok-Natuna Di Laut Cina Selatan (2014-2018). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25204>
- Aritonang. (2014, April 20). Ini Visi Dan Misi Joko Widodo-JK. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/20/1421367/ini.visi.dan.misi.joko.widodo-jk>
- Arsana, M. A. (2015). Memetakan Posis Indonesia Di Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Tinjauan Geo Spasial Dan Legal. 4(1), 33–39.
- Artharini, I. (2016). Seberapa Efektif Rencana Menambah Kekuatan Militer Di Natuna? [Online Post]. *BBC Indonesia*. <http://www.bbc.com>

Com/Indonesia/Berita_Indonesia/2016/05/160531_Indonesia_Ryamizard_Natuna

- Bauman, F. (2020). *The Next Frontier Human Development And The Anthropocene: UNDP Human Development Report 2020*. UNDP. <https://doi.org/10.1080/00139157.2021.1898908>
- BBC. (2017). China Tegaskan Klaim Wilayah Laut China Selatan Yang Masih Jadi Sengketa [Online Post]. BBC News. <http://www.bbc.com/Indonesia/Dunia-38730199>
- Bhatnagar, T. (2016). Megapa Indonesia Menambah Kekuatan Militer. BBC News. http://www.bbc.com/Indonesia/Dunia/2015/12/151230_Dunia_Indonesia_Natun
- BPHN. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 [Dataset]. <https://www.bphn.go.id/data/documents/02pp038.pdf>
- BPK RI. (2023). Pemerintah Pusat Kucurkan Rp 120 Miliar Untuk Pembangunan Jalan Di Pulau Natuna [Berita]. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. <https://kepri.bpk.go.id/pemerintah-pusat-kucurkan-rp-120-miliar-untuk-pembangunan-jalan-di-pulau-natuna/>
- BPKIM. (2017). Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017 [Online Post]. Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan. http://www.bkipm.kkp.go.id/kipmepublic/files/regulasi/PERPRES_NO_16_2017.pdf
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods (4th Edition)*. Oxford University Press.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest In International Relations Theory*. Palgrave Macmillan.
- Chen, J. (2014). *New Perspectives On Indonesia: Understanding Australia'S Closest Asian Neighbour*. Usasia Centre.
- China Daily Mail. (2024). Indonesia Joins Push Against China Beeds Up Air Force In South China Sea [Online Post]. <http://www.chinadailymail.com/Indonesia-Joinspush-Against-China-Beeds-Up-Air-Force-In-Southchina-Sea>

- CNBC Indonesia. (2019). Kemenlu Lokakarya Penanganan Konflik Laut China Selatan. [Online Post]. Redaksi CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190912143809-4-98983/kemenlu-lokakarya-penanganan-konflik-laut-china-selatan>
- CNN. (2020). Pemerintah Tempuh Diplomas “Soft” Dan “Hard” Di Natuna [Online Post]. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200106151609-20-462853/pemerintah-tempuh-diplomasi-soft-dan-hard-di-natuna>
- Connelly, A. L. (2016). Indonesia In The South China Sea: Going It Alone. Lowy Institute For International Policy.
- Cresswell, J. W., & Cresswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (Fifth Edition). SAGE.
- Dahuri, & Rokhmin. (2014). Indonesia Poros Maritim Dunia Pilihan Kebijakan Sangat Tepat. Institut Keamanan & Keselamatan Maritim Indonesia.
- Dam, S. (2010). Politik Kelautan. Bumi Aksara.
- Deutsche Welle. (2020). Joko Widodo: Dari Dulu Sampai Sekarang, Natuna Adalah Indonesia [Online Post]. Deutsche Welle News. <https://www.dw.com/id/joko-widodo-dari-dulu-sampai-sekarang-natuna-adalah-indonesia/a-51926824>
- DKP. (2017). Statistik Perikanan Kabupaten Natuna 2016 [Online Post]. DKP Kabupaten Natuna. <https://dkp.kabupaten.natuna.com>
- Dokumen Cloud. (1974). Dash Line Map [Online Post]. Center For Strategic And International Studies. <https://www.documentcloud.org/documents/1347513-PrC-Img-Eleven-Dotted-Line-1947.html#annotation/A185712>
- Dougherty, J. E., & Robert L, P. J. (1971). Contending Theories In International Relations. JB. Lippincot Co.
- DPMPTSP. (2020). Pemerintah Akan Optimalikan Industri Perikanan Di Perairan Natuna. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. <https://dpmptsp.natunakab.go.id/pemerintah-akan-optimalikan-industri-perikanan-di-perairan-natuna/>
- Fatir, D. (2017). China: AS Perlu Asah Pengetahuannya Tentang Sejarah Laut China Selatan [Online Post]. Antarababel. <http://www.antarababel>.

Com/Berita/52137/China-As-Perlu-Asah-Pengetahuannya-Tentang-Sejarah-Laut-China-Selatan

- Fravel, M. T. (2016). Traditional Fishing Grounds And China's Historic Rights Claims In The South China Sea [Online Post]. Maritime Awareness Project. [Http://Maritimeawarenessproject.Org/2016/07/11/Traditional-Fishing-Grounds-And-Chinas-Claims-Inthe-South-China-Sea/](http://Maritimeawarenessproject.Org/2016/07/11/Traditional-Fishing-Grounds-And-Chinas-Claims-Inthe-South-China-Sea/)
- Goh, E. (2005). Meeting The China Challenge: The U.S. In Southeast Asian Regional Security Strategies. East-West Center.
- Gunawan, F. W., Aulia, D., Andriyana, & Fajar, N. R. (2023). Attitudes And Strengths Of The Government Of Indonesia In Resolving The Natuna Sea Conflict: Analysis Of Indonesia-China Interdependence Relations. *Journal Of Social And Political Science Society*, 1.
- Gupta, S. (2015). The Nine Dash Line And Its Basis In International Law [Security]. China Us Focus. [Https://Www.Chinausfocus.Com/Peace-Security/The-Nine-Dash-Line-And-Its-Basis-In-International-Law](https://Www.Chinausfocus.Com/Peace-Security/The-Nine-Dash-Line-And-Its-Basis-In-International-Law)
- Harian Kompas. (2018). Diplomasi Kartografis Di Laut Natuna. *Koran Harian Kompas*.
[Http://Kompas.Id/Baca/Opini/2017/07/04/Diplomasi/Kartografis-Di-Laut-Natuna/](http://Kompas.Id/Baca/Opini/2017/07/04/Diplomasi/Kartografis-Di-Laut-Natuna/)”.
- Herindrasti, V. S. (2014). Membangun Poros Maritim Indonesia Relevansi Aspek Sosial Budaya. Universitas Budi Luhur: Jakarta.
- Hidayat, S. (2017). Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan.
- IHO. (N.D.). Working Group On The Revision S-23 (Limits Of Ocean And Seas). International Hydrography Organization. Www.Iho.Int
- Ilmi, N. (2020). Dampak Penamaan Laut Natuna Utara Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok. *Journal Of International Relations*, 6(4), 482–490. [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jihi](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jihi)
- Informasi Indonesia. (2020). Sengketa Di Kawasan Laut Natuna Utara [Narasi]. Portal Informasi Indonesia. [Https://Indonesia.Go.Id/Narasi/Indonesia-Dalam-Angka/Politik/Sengketa-Di-Kawasan-Laut-Natuna-Utara](https://Indonesia.Go.Id/Narasi/Indonesia-Dalam-Angka/Politik/Sengketa-Di-Kawasan-Laut-Natuna-Utara)

- Jakarta Post. (2014). Editorial: Endorsing Joko Widodo. The Jakarta Post. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata
- Jaya, M., Sitamala, B. P., & Danial. (2021). State Exclusivity Of Fisheries Resources On Exclusive Economic Zone In Efforts To Support The Fisheries Availability As A Means Of Increasing Food Security For The State [Online Post]. Atlantis Press Advances In Biological Sciences Research.
- JDIH Marves. (2022). Laut Natuna-Natuna Utara Termasuk Dalam Perencanaan Zonasi Kawasan Antarwilayah. JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman Dan Investasi. <https://jdih.maritim.go.id/laut-natuna-natuna-utara-termasuk-dalam-perencanaan-zonasi-kawasan-antarwilayah>
- Joko, S. (2005). Hukum Laut Indonesia. Rineka Cipta.
- Junida, A. I. (2017). Pemerintah Resmikan Penamaan Laut Natuna Utara [Online Post]. Antara News. <http://www.antarane.ws.com/berita/640261/pemerintah-resmikan-penamaan-laut-natuna-utara>
- Kadar, A. (2015). Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia. Jurnal Keamanan Nasional, 1(3), 427.
- Kadir, A., & Triwahyuni, T. C. (2013). Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi. Andi.
- Katadata. (2016). Bertebar Ladang Migas, Joko Widodo Akan Perkuat Keamanan Natuna. <http://katadata.co.id/berita/2016/06/23/bertebar-ladang-migas-joko-widodo-perintahkan-perkuatkeamanan-natuna>
- Kemenko. (2017). Kemenko Maritim 3th Joko Widodo-JK. Kementerian Koordinator Kemaritiman. <http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2017/10/20171018-kemenko-maritim-3th-joko-widodo-jk-cetak.pdf>
- Kemhan. (2017a). Kemhan Bangun Sarana Dan Prasarana Pertahanan Di Pulau Natuna. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2017/03/08/kemhan-bangun-sarana-dan-prasarana-pertahanan-di-pulau-natuna.html>

- Kemhan. (2017b). Menhan Dampingi Menkopolkam Canangkan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan Di Natuna. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2017/03/08/menhan-dan-beberapa-menteri-kabinet-kerja-dampingi-menkopolkam-canangkan-pembangunan-terpadu-kawasan-perbatasan-di-pulau-natuna.html>
- Kertopati, S. (2020). Mengkaji Penyelesaian Konflik Natuna. Inews. <https://www.inews.id/news/nasional/mengkaji-penyelesaian-konfliknatuna>
- KKP. (2016). KKP Jadikan Selat Lampa Sentra Perikanan Terpadu Di Perairan Natuna. Direktorat Jendral Perikanan Tangkap. <http://www.djpt.kkp.go.id/read/kkp-jadikan-selat-lampa-sentra-perikanan-terpadu-di-perairan-natuna>
- KKP. (2019). Sidatik Kementerian Kelautan Dan Perikanan [Online Post]. Kementerian Kelautan Dan Perikanan. <http://sidatik.kkp.go.id/files/src/835b80111277d6a739b233613068b11a.pdf>
- Komeini, Y., & Situmeang, N. (2018). The North Natuna Sea Renamed As Geopolitics Of Indonesia In Natuna.
- Kominfo. (2016). Menuju Poros Maritim Dunia [Online Post]. Kementerian Komunikasi Dan Informatika. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata
- Kompas News. (2014). Nawa Cita. 9 Agenda Joko Widodo Dan Jusuf Kalla [Online Post]. Kompas.Id. <http://nasionalKompas.com/read/2014/05/21/0754454nawacita9.agenda-prioritas-joko-widodo-jk>
- Kusumaatmadja, M. (1978). Bunga Rampai Hukum Laut (1). Binacipta.
- Luerdi, & Wahyudi, H. (2020). Indonesia's Border Security Policy In The Natuna Islands (2014-2020). MICOSS 10.4108/Eai.28-9-2020.2307560. <https://doi.org/10.4108/Eai.28-9-2020.2307560>

- Lumbanrau, R. E. (2016). Indonesia Dan China Di Pusaran Laut China Selatan [Online Post]. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160624092606-75-140606/Indonesia-Dan-China-Di-Pusaran-Laut-China-Selatan>.
- Maritim News. (2017). Pushidroosal Perjuangkan Nama Laut Natuna Menjadi Laut Natuna Utara [Online Post]. Mairitim News. <https://maritimnews.com/2017/07/pushidroosal-perjuangkan-nama-laut-natuna-menjadi-laut-natuna-utara/>
- Masoed, M. (1994). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi. LP3ES.
- Maulana, R. Y., & Rakhman, Moh. A. (2020). Good Governance's Approach To Strengthening State Border Security: A Study In The North Natuna Sea. *Jurnal Wacana Politik*, 5(1).
- Menpan. (2020). Konflik Di Perairan Natuna Arahan Presiden: Pemerintah Tegas Sekaligus Prioritaskan Diplomatik Damai [Online Post]. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/konflik-di-perairan-natuna-arahan-presiden-pemerintah-tegas-sekaligus-prioritaskan-diplomatik-damai>
- Menpan. (2021). Presiden Joko Widodo: Kerja Nyata Kokohkan Identitas Indonesia Sebagai Bangsa Mariti. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-joko-widodo-kerja-nyata-kokohkan-identitas-indonesia-sebagai-bangsa-maritim>
- Miftahuddin. (2024). Natuna Dalam Konsepsi Poros Maritim Dunia. *STAI Natuna Indonesia*, 3.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third Edition)*. SAGE Publication, Inc.
- Mima. (2018). Workshop On Managing South China Sea. Maritime Institute Of Malaysia. http://www.mima.gov.my/v2/?M-Posts&C=Shw_Details&D=479

- Morgenthau, Thompson, H., & W, K. (1997). *Politics Among Nations The Struggle For Power And Peace*. Peking University Press.
- Muhaimin, R. (2018). Kebijakan Sekuritisasi Dan Persepsi Ancaman Di Laut Natuna Utara. 9(1).
- Muhammad, A., & Maksum, A. (2016). *Keamanan Asia Tenggara*. LP3M.
- Murdaningsih, D. (2017). Indonesia Resmikan Penggunaan Nama Laut Natuna Utara. Republica.Co.Id. [Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/17/07/14/Ot2hbc368-Indonesia-Resmikan-Penggunaan-Nama-Laut-Natuna-Utara](http://www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/17/07/14/Ot2hbc368-Indonesia-Resmikan-Penggunaan-Nama-Laut-Natuna-Utara)
- Nainggolan, P. P. (2015). Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya. 6(2).
- Nasarius, E. (2016). Putusan PCA (Permanent Court Of Arbitration) Tentang Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Wilayah Pengelolaan Perikanan Di Laut Natuna.
- Nasution, A. B., & Zen, A. P. M. (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Natunakab. (2013). *Sekilas Natuna*. Website Kabupaten Natuna. [Http://Www.Natunakab.Go.Id/Sekilasnatuna.Htm](http://www.Natunakab.Go.Id/Sekilasnatuna.Htm)
- Natunakab. (2018). *Presiden: Kembangkan Natuna*. Dinas Pariwisata Natuna Kab. [Https://Dinaspariwisata.Natunakab.Go.Id/Presiden-Kembangkan-Natuna/](https://Dinaspariwisata.Natunakab.Go.Id/Presiden-Kembangkan-Natuna/)
- Natunakab. (2019). *Peluang Dan Investasi*. Official Website Natuna District Governmens. [Http://Www.Natunakab.Go.Id/Investasi.Html](http://www.Natunakab.Go.Id/Investasi.Html)
- Nauvalido, M. Z. (2024). Bentuk Sekuritisasi Dan Kepentingan Nasional Indonesia Terhadap Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Public Knowledge*, 1(1). [Https://Doi.Org/10.62771/Pk.V1i1.3](https://doi.org/10.62771/Pk.V1i1.3)
- Ningsih, D. (2016). Natuna Jadi Sentra Perikanan Dan Kelautan Terpadu [Online Post]. *Berita Satu*. [Https://Www.Beritasatu.Com/Ekonomi/372012/Natuna-Jadi-Sentra-Perikanan-Dan-Kelautan-Terpadu](https://www.Beritasatu.Com/Ekonomi/372012/Natuna-Jadi-Sentra-Perikanan-Dan-Kelautan-Terpadu)
- Ningsih, O. A., Indra, M., & Etorita, W. (2016). Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly Di Laut China Selatan Berdasarkan Unclos III Tahun 1982. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2).

- <https://www.neliti.com/publications/185226/sengketa-kepemilikan-kepulauan-spratly-di-laut-china-selatan-berdasarkan-unclos>
- Noor, A. F. (2016). Gerakan Revolusi Mental Untuk Meningkatkan Pendidikan Kepribadian Warga Negara. *Pedagogik Jurnal Pendidikan*, 10.
- Novianto, R. D., Firmansyah, D. A., & Pratama, N. A. (2020). Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1).
- Nuechterlein, D. E. (1976). *National Interest And Foreign Policy: A Conceptual Framework For Analysis And Decision Making (Vol. 2)*. British Journal Of International Studies.
- Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. (2016). Maritime Diplomacy. Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritime Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11059>
- Papp, D. S. (1988). *Contemporary International Relation: A Framework For Understanding (Second Edition)*. Macmillan Publishing Company.
- Parandaru, I. (2024). Sengketa Laut China Selatan Dan Ancaman Kedaulatan Indonesia. *Kompas Pedia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sengketa-laut-china-selatan-danancaman-kedaulatan-indonesia>
- Pasek, I. M., & Diantha. (2002). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Mandur Maju.
- Perkasa, A. (2016). Laut Natuna Jadi Sumber Migas Asia [Online Post]. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623134311-20-140387/laut-natuna-jadi-sumber-migas-asia>
- Plano, J. C., & Olton, R. (1982). *The International Dictionary*. ABC-CLIA.
- Primananda, T., Salman, R., & Sukardi. (2020). Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Bina Hukum*, 4(2).
- Purba, J. A. A., & Burhanuddin, A. (2023). Encourage From Fear: Perubahan Nama Laut Natuna Utara Sebagai Upaya Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 13–20. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.987>

- Pusat Kajian Maritim. (2021). Kajian Sejarah Dan Geopolitik Laut Natuna Utara [Online Post].
- Pushidrosal. (2018). Data Kelautan Yang Menjadi Rujukan Nasional Diluncurkan. Pusat Hidro Oceanografi TNI AL. [Online Post]. Pushidrosal.Id. [https://www.pushidrosal.id/berita/5256/data-kelautan-yang-menjadi-rujukan-nasional--diluncurkan/#:~:Text=Luas Perairan Indonesia 6.400.000](https://www.pushidrosal.id/berita/5256/data-kelautan-yang-menjadi-rujukan-nasional--diluncurkan/#:~:Text=Luas%20Perairan%20Indonesia%206.400.000).
- Rachmandani, M. (2022). Peluang Dan Tantangan Pengubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Oleh Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional. Universitas Brawijaya, 26–27.
- Ramdhan, B. (2017). Peta Indonesia Diperbarui, Begini Perbedaannya Dengan Peta Lama [Online Post]. Good News From Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/07/20/peta-indonesia-diperbarui-begini-perbedaannya-dengan-yang-peta-lama>
- Ratriani, V. R. (2020). Cerita Panjang Konflik China-Indonesia Di Laut Natuna. Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/cerita-panjang-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all>
- Ristian, A. S. (2015). Indonesia's Natuna Islands: Next Flashpoint In South China Sea. RSIS. <http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2015/02/C015033>
- Riyadi, R. A., & Sari, D. A. A. (2019). Pemutakhiran Peta Di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia. *BELLIAC PACIS*, 5(1), 19–31.
- Rosarian, F., & Pahlevi, A. (2013). Diklaim China, Natuna Dikawal TNI. *Koran Tempo*. tempo.co/read/nasional/299283/diklaim-cina-natuna-dikawal-tni
- Rudy, T. M. (2002). *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. PT. Refika Aditama.
- Ruyat, M.Eng, Dr. Y. (2017). Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna Dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*.

- Sambogo, A. (2019). Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 1(2), 381. <https://doi.org/10.20473/Jd.V1i2.10787>
- Setkab. (2016). Pidato Di Sidang IMO, Presiden Joko Widodo Komitmen Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/pidato-di-sidang-imo-presiden-joko-widodo-komitmen-jadikan-indonesia-poros-maritim-dunia/>
- Setkab. (2016). Presiden Joko Widodo Ingin Kembangkan Pelabuhan Kelas Dunia Di Perbatasan Selat Malaka, Natuna, Dan Batam. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/presiden-joko-widodo-ingin-kembangkan-pelabuhan-kelas-dunia-di-perbatasan-selat-malaka-natuna-dan-batam/>
- Setkab. (2016). Presiden Joko Widodo Minta Pembangunan Infrastruktur Kepulauan Natuna Segera Dimulai. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/presiden-joko-widodo-minta-pembangunan-infrastruktur-kepulauan-natuna-segera-dimulai/>
- Setkab. (2020). Akan Intensifkan Patroli Di Perairan Natuna, Indonesia Desak China Hormati UNCLOS [Berita]. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/akan-intensifkan-patroli-di-perairan-natuna-indonesia-desak-china-hormati-unclos/>
- Setkab. (2020). Konflik Di Perairan Natuna, Arahan Presiden: Pemerintah Tegas Sekaligus Prioritaskan Diplomati Damai [Berita]. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/konflik-di-perairan-natuna-arahan-presiden-pemerintah-tegas-sekaligus-prioritaskan-diplomatik-damai/>
- Setkab. (2020). Tak Akan Akui “Nine Dash Line”, Menlu: China Harus Patuhi UNCLOS [Berita]. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/tak-akan-akui-nine-dash-line-menlu-china-harus-patuhi-unclos/>
- Setkab. (2020). Temui Ratusan Nelayan, Presiden Joko Widodo Pastikan SKPT Natuna Bermanfaat 2020 [Berita]. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

- [https://Setkab.Go.Id/Temui-Ratusan-Nelayan-Presiden-Joko Widodo-Pastikan-Skpt-Natuna-Bermanfaat/](https://Setkab.Go.Id/Temui-Ratusan-Nelayan-Presiden-Joko-Widodo-Pastikan-Skpt-Natuna-Bermanfaat/)
- Setneg. (2016). Kunjungan Ke Natuna Percepatan Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan, Beranda Terdepan Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/kunjungan_ke_natuna_percepatan_pembangunan_ekonomi_wilayah_perbatasan_beranda_terdepan_indonesia
- Setneg. (2016). Presiden Joko Widodo Instruksikan Percepat Pembangunan Natuna. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_joko_widodo_instruksikan_percepat_pembangunan_natuna
- Shabrina, N. O. (2017). Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok Yang Melewati Perairan Natuna. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6.
- Shu, Y., Wang, J., & Lin. (2013). U.S. Report Details Rich Resources In South China Sea. Focus Taiwan. http://focustaiwan.tw/Shownews/Webnews_Detail.aspx?ID=201302090013&Type=Aipl.
- Sitepu, P. A. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitohang, J. (2018). *Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Di Laut China Selatan: Kepentingan Indonesia Di Perairan Natuna*. LIPI Press.
- Soedewo, L. M. T. A. (2018). Kuliah Umum Hukum Laut Internasional “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia”, Research Cluster For Sustainable Ocean Policy (CSOP) [Online Post]. <https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>
- Strangio, S. (2022). After 12 Years, Indonesia And Vietnam Agree On EEZ Boundaries. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2022/12/after-12-years-indonesia-and-vietnam-agree-on-eez-boundaries/>
- Suastha, R. D., & Dewi, A. K. (2016). RI Mesti Waspada Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan [Online Post]. CNN Indonesia. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160703151959-20->

142745/Ri-Mesti-Waspadaidampak- Putusan-Arbitrase-Laut-China-Selatan/

- Subagyo, P. (2009). *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sugianto, D. (2016). *OP BISNIS : Kekayaan Natuna Versi Menteri Susi Hingga Pujian Sri Mulyani*. Okezone.Com. [Http://Economy.Okezone.Com/Read/2016/07/26/320/1447464/Top-Bisnis-Kekaydan-Natunaversi-Menter-Sust-Ninga-Pujian-Sn-Mulyan](http://Economy.Okezone.Com/Read/2016/07/26/320/1447464/Top-Bisnis-Kekaydan-Natunaversi-Menter-Sust-Ninga-Pujian-Sn-Mulyan)
- Sukma, R. (2014). *Gagasan Poros Maritim* [Online Post]. Centre Of Strategic And International Studies.
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). *Indonesia's Responses Amidst The Dynamic Of The South China Sea Dispute Under Joko Widodo's Administration* [Respons Indonesia Di Tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan Di Bawah Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Politca Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 12(1), 85–103. <https://doi.org/10.22212/Jp.V12i1.2149>
- Supriyatno, A., Aminah, N., & Afiati, R. (2016). *Pengaruh Deviden Per Share, Return On Equity, Net Profit Margin, Return On Investment Dan Return On Asset Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2013*. 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.1111/Jgh.14027>
- Sutari, T. (2019). *Pendaftaran Laut Natuna Utara Ke PBB Butuh Waktu* [Online Post]. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170720202341-106-229303/Luhut-Pendaftaran-Laut-Natuna-Utara-Ke-Pbb-Butuh-Waktu>
- Tarno, M. F. T. S. (2017). *Global Maritime Fulcrum (Gmf) Performances To Deal With Tensions In South China Sea Disputes: A Constructivist Analysis Of Indonesia's Strategic Culture*. Thammasat University.
- Tom, A., & Benardette, C. M. (2017). *Asserting Sovereignty, Indonesia Renames Part Of South China Sea* [Online Post]. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-map/asserting-sovereignty-indonesiarenames-part-of-south-china-sea-iduskbn-19Z0YQ>

- Tsauro, M. A. (2017). Arti Deklarasi Djuanda Dan Konferensi Hukum Laut PBB Bagi Indonesia. 4(1), 185–190. <https://doi.org/10.14710/Gk.2017.3780>
- Ulwiya, S. (2019). Deklarasi Djuanda Dalam Sejarah Nusantara [Online Post]. ITS Online. <https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/>
- UNCLOS. (1982). United Nations Convention On The Law Of The Sea.
- UUD 1945. (N.D.). Isi And Pokok Pikiran Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Online Post].
- Wahyuni, S. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok. *Jurnal Sosioreligius*, 2(4). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sosioreligius/article/download/13321/8262>
- Wardah, F. (2016). Indonesia Tegaskan Kembali Kepemilikan Pula Natuna. *WOA Indonesia*. <http://www.woaindonesia.com/aindonesia-tegaskan-kembali-kepemilikan-pulaunatuna/33138015.html>
- Winarto, S. (2016). Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan (431st Ed.). Cakrawala.
- Wismabrata, Mi. H. (2020). Amankan Laut Natuna, TNI Siapkan 18 Operasi Siaga Tempur. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/05/14070091/amankan-laut-natuna-tni-siapkan-18-operasi-siaga-tempur-?Page=All>.
- Yanto, N. (2014). Memahami Hukum Laut Indonesia. *Mitra Wacana Media*.
- Zakaria, F. (1992). Realism And Domestic Politics, *International Security*. 17(1), 179.